

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Piutang

2.1.1 Pengertian Piutang

Piutang adalah klaim perusahaan atas sejumlah pembayaran yang harus diterima dari pelanggan yang telah membeli produk atau layanan secara kredit. Piutang ini akan berubah menjadi kas setelah pelanggan melunasi tagihannya dalam periode waktu tertentu berdasarkan kesepakatan pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Logor *et al.* (2020) piutang ialah mengacu pada jumlah nominal tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dari pihak lain (biasanya dalam bentuk kas), sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa secara kredit.

Hafid *et al.* (2021) mengemukakan bahwa piutang dapat diklasifikasikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, piutang merujuk pada tagihan kepada pihak lain yang berkaitan dengan sejumlah uang. Sementara itu, dalam arti luas, piutang mencakup tagihan kepada pihak lain yang meliputi uang, barang, maupun jasa. Dalam hal ini piutang tidak hanya tagihan uang tunai dari penjualan kredit, tetapi juga mencakup hak perusahaan atas barang atau jasa yang sudah diberikan.

Berdasarkan pengertian piutang yang dijelaskan dalam berbagai sumber, maka penulis dapat menyimpulkan piutang

merupakan hak perusahaan untuk menagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya transaksi penjualan berupa kredit baik berupa sejumlah uang, barang, atau jasa yang telah diberikan. Pengelolaan piutang yang efektif sangat penting untuk stabilitas arus kas dan meminimalkan piutang macet atau tidak tertagih.

2.1.2 Klasifikasi Piutang

Menurut Anastasia (2020) piutang dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Piutang usaha

Piutang yang timbul dari usaha pokok suatu perusahaan, misalnya piutang dagang dan jasa .

2. Piutang non-usaha

Piutang yang timbul selain dari usaha pokok perusahaan, misalnya piutang kepada karyawan, uang muka ke kantor cabang, klaim asuransi, dan hasil investasi.

Menurut Anggi Anjarsari & Handayani (2022) piutang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Piutang Dagang

Piutang dagang merupakan total tagihan dari pelanggan yang belum dibayarkan karena terjadi transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Umumnya piutang dagang memiliki jangka waktu pembayaran 30-60 hari, sesuai dengan syarat kredit seperti n/30 atau n/60.

2. Piutang Wesel atau Wesel Tagih

Piutang wesel adalah dokumen tertulis yang menyatakan adanya hutang atau janji pelunasan. Wesel tagih diklaim sebagai bukti formal atas transaksi kredit sebagai bukti adanya utang debitur kepada perusahaan. Wesel tagih umumnya memberi jangka waktu pembayaran 60-90 hari atau lebih lama serta mengharuskan debitur untuk membayar bunga atas tersebut.

3. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang yang timbul bukan dari aktivitas perdagangan, contohnya piutang bunga, piutang karyawan, piutang dividen.

2.1.3 Pengakuan Piutang Usaha

Pengakuan piutang usaha muncul akibat transaksi penjualan secara kredit oleh perusahaan atau menyediakan layanan tanpa adanya pembayaran tunai dari pelanggan. Berdasarkan PSAK No. 50 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar yang merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada saat tanggal transaksi (Aimbu *et al.*, 2021). Pengakuan piutang usaha biasanya berkaitan dengan pengakuan pendapatan atau pemasukan. Hal ini disebabkan karena pengakuan pendapatan umumnya dilakukan saat proses perolehan keuntungan telah selesai dan dana dapat dicairkan atau direalisasikan. Dengan demikian, piutang yang timbul dari transaksi penjualan

barang umumnya dicatat pada saat kepemilikan barang sudah beralih kepada pembeli. Pentingnya pengakuan piutang usaha bukan hanya berdampak pada pencatatan keuangan, namun mempengaruhi analisis kinerja keuangan perusahaan juga.

2.1.4 Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih merupakan tagihan yang tidak dapat dibayarkan dari pelanggan atau pihak lain karena berbagai alasan, seperti kebangkrutan pelanggan atau ketidakmampuan finansial pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan bagi perusahaan. Piutang tak tertagih terjadi ketika ketidakmampuan pelanggan untuk membayar kewajibannya disebabkan oleh keadaan ekonomi yang turun dan kebangkrutan dari pihak debitur (Anggraeni *et al.*, 2023).

Meskipun tidak ada aturan umum terkait penentuan piutang tak tertagih, namun terdapat beberapa indikasi yang menandakan bahwa piutang tersebut tak tertagih, diantaranya adalah ketika piutang sudah jatuh tempo, pelanggan tidak menindaklanjuti tagihan dari perusahaan, usaha pelanggan sudah bangkrut atau pailit, dan pelanggan sudah tidak bisa dikomunikasikan kembali. Terdapat dua metode dalam piutang tak tertagih yaitu :

1. Metode Penghapusan Langsung (*Direct write-off Method*)

Pada metode ini, piutang akan dihapus langsung ketika benar - benar piutang tersebut tidak dapat tertagih. Meskipun

tampak sederhana, metode ini bertentangan dengan prinsip akuntansi berterima umum (GAAP) karena adanya ketidaksesuaian antara beban dan pendapatan dalam periode waktu yang sama. Contoh ilustrasi, perusahaan X memiliki piutang Rp 12.000.000 pada perusahaan Y yang sedang mengalami pailit, maka ayat jurnal untuk menghapus piutang adalah sebagai berikut:

Beban piutang tak tertagih Rp 12.000.000

Piutang usaha Y Rp 12.000.000

Piutang usaha yang sebelumnya sudah dihapus dalam pencatatan, bisa ditagih kembali dikemudian hari. Jika terjadi hal tersebut, piutang bisa dicatat kembali dengan sebuah jurnal yang membalik dengan jurnal sebelumnya. Maka ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan dari pembukuan lalu menerima kas pembayaran dari piutang tersebut adalah sebagai berikut

Piutang usaha Y Rp 12.000.000

Beban piutang tak tertagih Rp 12.000.000

Kas Rp 12.000.000

Piutang usaha Y Rp 12.000.000

2. Metode Cadangan (*Allowance method*)

Pada metode cadangan ini, perkiraan atau estimasi menjadi dasar perusahaan dalam membentuk cadangan atau penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian beban piutang tak tertagih tersebut akan dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian. Pada metode ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip akuntansi karena beban dicatat dalam periode yang sama terhadap pendapatan yang dihasilkan. Contoh ilustrasi metode cadangan ini adalah, PT. EDA adalah perusahaan yang melakukan transaksi penjualan secara kredit. PT. EDA memiliki piutang sebesar Rp 70.000.000 termasuk piutang yang telah lewat jatuh temponya. PT. EDA memperkirakan adanya piutang tak tertagih sebesar Rp15.000.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

Beban piutang tak tertagih Rp 15.000.000

Cadangan Piutang tak tertagih Rp15.000.000

2.1.5 Kebijakan Kredit

Kebijakan kredit merupakan pedoman atau ketentuan dalam perusahaan ketika memberikan pinjaman kepada *customer* dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan sekaligus menjaga likuiditas perusahaan agar tidak terganggu oleh penumpukan piutang.

Terdapat 3 komponen kebijakan kredit yaitu syarat kredit, standar kredit, dan kebijakan penagihan (Zulna, 2022). Adapun penjelasan dari masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat Kredit

Syarat kredit merupakan ketentuan mengenai bagaimana dan kapan pelanggan harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang mereka sudah dibeli secara kredit.

2. Standar Kredit

Standar kredit merupakan ketentuan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kelayakan *customer* yang bisa mendapatkan fasilitas kredit.

3. Kebijakan Penagihan

Kebijakan penagihan merupakan langkah – langkah atau aturan yang dilakukan dari perusahaan untuk menagih piutang kepada *customer* yang belum melakukan pembayaran. Seperti mengirimkan pesan atau surat peringatan hingga tindakan hukum.

2.2 Tinjauan Atas Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berkaitan guna mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat berupa fisik maupun abstrak dan pada umumnya digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, teknologi informasi, ekonomi, dan teknik. Nor Amelia *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa sistem pada dasarnya merupakan sekumpulan unsur yang saling berhubungan satu sama lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Retnosari & Nilasari (2021) sistem merupakan suatu jaringan

prosedur yang saling terhubung untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Berdasarkan definisi sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu, dimana sistem ini melibatkan tahapan berupa masukan (*input*) yang kemudian diolah melalui proses dan menghasilkan keluaran (*output*). Oleh sebab itu, sangat penting memahami bagaimana elemen – elemen tersebut saling bekerja sama dan berdampak pada kinerja keseluruhan sistem.

2.2.2 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang dirancang guna mencapai tujuan dalam organisasi mencakup efektivitas operasional organisasi, tingkat keakuratan laporan keuangan dan kesesuaian antar kebijakan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Annisa & Yuniarti (2023) pengendalian intern ialah mencakup rencana organisasi serta seluruh prosedur dan peraturan yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk melindungi aset milik perusahaan, mengontrol terkait akurasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan mendorong kepatuhan kebijakan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Anggi Anjarsari & Handayani (2022) mengungkapkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu tindakan yang

dilakukan perusahaan sebagai proses yang berkesinambungan dengan aktivitas manajemen, dengan tujuan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

Dari pemahaman diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses, dimana proses tersebut melibatkan sumber daya manusia dan teknologi dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penerapannya, pengendalian internal memerlukan suatu sistem yang sistematis, yang dikenal sebagai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini berfungsi sebagai mekanisme yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam mendorong efektivitas pengendalian tersebut. Supriani & Suarjana (2024) menyatakan sistem pengendalian internal terdiri atas peraturan dan proses yang disusun untuk memberikan kepercayaan pada manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan targetnya serta menjamin ditaatinya peraturan yang berlaku. Sedangkan Seftiani & Retnowati (2021) mengemukakan sistem pengendalian internal meliputi rangkaian prosedur, metode dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk memperoleh sebuah sistem informasi akuntansi yang efisien dan terpercaya, untuk meminimalisir, mendeteksi dan memperbaiki ketika terjadi adanya kesalahan.

Dari definisi tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian merupakan kerangka atau struktur yang

digunakan dalam pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset perusahaan, menjamin keakuratan informasi akuntansi, dan memberikan kepercayaan yang cukup kepada manajemen guna mencapai tujuan organisasi. Dengan menggunakan sistem ini dapat mencegah dari adanya kecurangan – kecurangan dan penyalahgunaan terhadap aset perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan.

2.2.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan utama dalam sistem pengendalian internal adalah untuk menentukan indikator – indikator dalam suatu prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk mengawasi perkembangan dan keberlanjutan kinerja. Anastasia (2020) mengungkapkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal ada empat, diantaranya yaitu :

1. Mengawasi aktiva organisasi
2. Memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam perusahaan
4. Menjamin kesesuaian terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang efektif, maka perusahaan dapat meminimalisir risiko kerugian, memperkuat kepercayaan investor dan kreditor, serta mengoptimalkan kinerja dan efisiensi perusahaan secara menyeluruh.

2.2.4 Unsur – unsur Sistem Pengendalian Internal

Dalam membangun suatu sistem pengendalian yang efektif dan efisien, diperlukan adanya empat pokok unsur yang saling mendukung yaitu pemisahan tugas, sistem persetujuan kebijakan, praktik sehat yang bermanfaat, karyawan yang memenuhi standar kinerja dan tanggung jawab (Anastasia et al., 2022). Adapun penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemisahan tugas (*Segregation of Duties*)

Pemisahan tugas merupakan aspek utama dalam sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk mencegah satu karyawan memiliki kendali penuh terhadap seluruh tahapan transaksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik kepentingan pribadi serta meminimalisir kecurangan – kecurangan yang disengaja.

2. Sistem persetujuan kebijakan (Otorisasi)

Setiap transaksi dalam sebuah organisasi bisa dilakukan ketika sudah ada persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memberikan otorisasi. Oleh karena itu diperlukan sistem yang mengatur pembagian kewenangan tersebut dengan jelas agar setiap transaksi yang terjadi mendapatkan pengawasan dengan baik. Penerapan sistem otorisasi yang terstruktur membantu organisasi dalam meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

3. Praktik sehat yang bermanfaat

Dalam praktik sistem pengendalian internal dibutuhkan langkah – langkah yang strategis untuk memastikan bahwa proses yang dilaksanakannya sesuai dengan prinsip – prinsip yang sehat dan bermanfaat. Hal ini perlu diterapkan agar semua operasional organisasi, baik pembagian tugas fungsional, sistem otoritas, dan prosedur pencatatan yang diterapkan dapat berjalan dengan optimal.

4. Karyawan yang memenuhi standar kinerja dan tanggung jawab

Kualitas karyawan dalam sistem pengendalian internal merupakan unsur yang sangat dibutuhkan. Hal ini merujuk pada kemampuan untuk mengendalikan dan memastikan efektivitas pengendalian internal dalam perusahaan. Dengan memiliki karyawan yang memiliki keterampilan tinggi, berintegritas, dan profesionalisme, maka perusahaan dapat lebih mengandalkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian perusahaan dapat meminimalisir unsur pengendalian internal lainnya tanpa mengurangi keandalan akurasi laporan keuangan.

2.3 Komponen – komponen Sistem Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menuliskan sistem pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen-komponen yang saling berhubungan (Dewi & Reviandani, 2024). Adapun lima komponen tersebut antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian ini meliputi aspek dasar dalam perusahaan seperti budaya atau kebiasaan di organisasi, nilai-nilai, norma, etika, struktur dalam organisasi, sistem penghargaan dan sanksi, serta kebijakan – kebijakan dalam perusahaan yang merupakan peran penting dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Untuk memahami dan mengukur tingkat risiko yang mungkin terjadi, perusahaan dapat menentukan skala prioritas dan mengambil strategi pencegahan yang tepat yaitu dengan melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko yang mungkin akan mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dalam proses ini, perusahaan meninjau faktor – faktor internal atau eksternal yang menghambat atau menimbulkan ketidakpastian dalam operasional bisnisnya. Melalui penerapan penilaian risiko yang sistematis, perusahaan dapat lebih proaktif dalam menghadapi tantangan bisnis.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Dalam kegiatan pengendalian ini meliputi kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen untuk mengelola risiko dan pencapaian tujuan perusahaan, seperti pembagian tugas dan wewenang yang jelas, pengawasan terhadap aktivitas operasional bisnis, serta rekonsiliasi dan pencatatan yang sistematis. Dengan menerapkan komponen ini dapat meminimalkan risiko kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses bisnis.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Untuk memastikan bahwa data informasi yang diperlukan tersedia dan diterima oleh pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, dewan direksi, serta auditor internal maupun eksternal maka diperlukan informasi dan komunikasi mencakup sistem pelaporan dan pengawasan. Dengan sistem yang efektif, aliran informasi yang berlangsung dapat lebih terstruktur dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid.

5. Pengawasan atau Pemantauan (*Monitoring*)

Pengawasan atau Pemantauan merupakan proses yang dilakukan secara terus – menerus untuk menentukan tingkat kualitas kinerja pengendalian internal. Dalam proses ini, memastikan bahwa semua aspek yang dikerjakan dalam organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam operasional bisnis organisasinya, setiap komponen sistem pengendalian internal ini harus dijalankan secara terintegrasi dan menyeluruh. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara optimal dalam semua aktivitas operasional perusahaan, diharapkan tidak akan terjadi tindakan yang dapat merugikan perusahaan, seperti tindakan kecurangan, baik kecurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selain itu, dengan penerapan sistem ini diharapkan perusahaan dapat meminimalisir risiko piutang tak tertagih dan memastikan arus kas yang lancar.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--------------------------------|--|
| 1 | Jannatul Fithria Ann'isa, Puji Yuniarti (2023) | Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT Mutiara Multi Finance Galur | Analisis Deskriptif Kualitatif | Pengendalian intern penagihan piutang PT Mutiara Multi Finance Cabang Galur sudah sesuai dengan SOP dari perusahaan yaitu bagian penagihan telah menjalankan tugasnya dengan terstruktur mulai dari order tagih, pembuatan kwitansi, proses penagihan, setor tagihan, pengembalian kwitansi tak tertagih dan review tagihan. |
| 2 | Luh Kadek Ayu Nita Dwi Wiranti, Putu Aristya Adi Wasita | Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak | Analisis Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian pada Harris Hotel sudah menerapkan pengendalian piutang dengan efektif, dengan tingkat presentase hasil penagihan piutang lebih |

| | | |
|--|--|---|
| (2023) | Tertagih Pada Harris Hotel Seminyak | dari 90%. Dengan demikian, pengendalian internal harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan melakukan <i>cost control</i> penjualan kamar harian dan mengingatkan kepada klien sebelum jatuh tempo pembayaran. |
| 3 Widyana1, Ini Putu Winda Ayuningtyas (2024) | Analisis Sistem Analisis Deskriptif Kualitatif Pengendalian Internal Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT. Manunggal Prima Sejahtera | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal piutang usaha pada PT. Manunggal Prima Sejahtera sudah efektif. Namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan sistem pengendalian internal piutang usaha dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada PT. Manunggal Prima Sejahtera berdasarkan komponen |

| COSO. | | | | | |
|-------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 4 | N Amalia, A Handayani (2023) | Analisis Pengendalian Intern Untuk Meminimalkan Resiko Piutang Tertagih Pada Pt X | Piutang Tak Tertagih Pada Pt X | Analisis Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan belum efektifnya penerapan sistem pengendalian intern piutang pelanggan PT X yang dibuktikan dengan tidak adanya pengendalian, pengawasan ataupun pemantauan, dan penilaian risiko tapi keakraban dan komunikasi dengan elemen lingkungan kontrol PT X sudah cukup, baik variabel internal maupun eksternal punya peran dalam terjadinya kredit macet. |
| 5 | A Muhtarom, NR Zulyanti, RD Amelia (2021) | Analisis Sistem Pengendalian Internal Usaha Dalam Meminimalkan Piutang Tertagih Pada | Sistem Piutang Tak Tertagih Pada | Analisis Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan system penanganan internal pada piutang yang diterapkan dilakukan seefektif mungkin dan kendala yang menghambat yakni tidak adanya memisahkan tugas |

Cv. Sinar Surya
Abadi Lamongan

yang diaplikasikan pada setiap bidang akuntansinya dengan penanganan internal, menyebabkan input yang salah berulang kali tetap dirasakan oleh perusahaan, serta tidak terdapatnya Tim yang dibentuk untuk menagih piutang.

Sumber : Berbagai Jurnal Penelitian, 2025